

**PENGARUH PMA, PMDN, JUMLAH PENDUDUK DAN
PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD)
DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2006-2020
SKRIPSI**



Nama : Muhammad Danuega Putra Arista
Nomor Mahasiswa : 17313181
Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
2022**

Pengaruh PMA, PMDN, Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 - 2020

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Muhammad Danuega Putra Arista
Nomor Mahasiswa : 17313181
Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Agustus 2022

Penulis,



Muhammad Danuega Putra Arista

PENGESAHAN

Pengaruh PMA, PMDN, Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 - 2020

Nama : Muhammad Danuega Putra Ariska
Nomor Mahasiswa : 17313181
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 17 Agustus 2022

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



Dr. Drs. Nur Feriyanto, M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH PMA, PMDN, JUMLAH PENDUDUK, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN
2006-2020**

Disusun Oleh : **MUHAMMAD DANUEGA PUTRA ARISTA**
Nomor Mahasiswa : **17313181**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Selasa, 11 Oktober 2022**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Nur Feriyanto, Prof. Dr. Drs., M.Si.



Penguji : Rokhedi Priyo Santoso, S.E., MIDEc.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia




SE., M.Si., Ph.D., CFA.

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah dengan segala kehendak serta kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Rasa syukur dan nikmat yang sebesar-besarnya bagi penulis. Skripsi ini dipersembahkan penulis untuk :

1. Kepada Allah SWT yang selalu memberikan berkat dan hidayahnya dan selalu memberikan hal – hal baik kepada penulis.
2. Kepada kedua orang tua penulis, yakni ayahanda Antoni Bendris dan ibunda Mita Novita Khaidir selalu menjadi panutan, memberi motivasi dan inspirasi, serta memberikan dukungan materi serta moril dan doa tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan kuliah dengan baik.
3. Kepada kakak tersayang Marisha Putri Nur Arista yang telah memberikan dukungan secara moral dan moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan kuliah dengan baik
4. Kepada dosen pembimbing bapak Dr. Drs. Nur Feriyanto, M.Si. Terima kasih banyak telah membimbing, membantu, memberikan solusi dan mengajarkan penulis dalam menyelesaikan karya ini.
5. Teman-teman tercinta. Terima kasih telah mendoakan, menghibur, membantu, memberikan nasehat dan semangat untuk segera menyelesaikan tugas akhir.
6. Semua kerabat dan sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberi semangat hingga skripsi ini selesai.
7. Untuk Almamaterku tercinta, Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah, puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi, juga shalawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas akhir program strata 1 jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Skripsi Ini berjudul “Pengaruh PMA, PMDN, Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 - 2020”. Kendala dan hambatan banyak penulis hadapi dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Kepada junjungan Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan manusia dimuka bumi ini.
3. Bapak Prof Dr. Drs. Nur Feriyanto, M.Si. yang merupakan Dosen

Pembimbing terbaik. Terimakasih telah sabar membimbing penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

4. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Sahabudin Sidiq, Dr., S.E., M.A. selaku Ketua Prodi Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
7. Seluruh Bapak-Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia khususnya Program Studi Ekonomi



Yogyakarta, 17 Agustus 2022

Penulis,

Muhammad Danuega Putra Arista

DAFTAR ISI

Halaman Judul	Error! Bookmark not defined.
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	Error! Bookmark not defined.
Halaman Pengesahan Skripsi.....	Error! Bookmark not defined.
Halaman Persembahan.....	Error! Bookmark not defined.
Halaman Kata Pengantar	Error! Bookmark not defined.
Halaman Daftar Isi.....	Error! Bookmark not defined.
Halaman Daftar Tabel.....	Error! Bookmark not defined.
Halaman Daftar Gambar	x
Halaman Lampiran.....	Error! Bookmark not defined.
Halaman Abstrak.....	Error! Bookmark not defined.ii
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Kajian pustaka.....	9
2.2 Landasan Teori.....	13
2.2.1 Pendapatan Asli Daerah	15
2.2.2 PMA,PMDN dan PAD	15
2.2.2.1 PMA dan PMDN.....	16
2.2.2.2 Hubungan PMA,PMDN dengan PAD	16
2.2.4 Jumlah Penduduk dan PAD	17
2.2.4.1 Jumlah Penduduk.....	17
2.2.4.2 Hubungan Jumlah Penduduk dengan PAD.....	18
2.2.4 Pengeluaran Pemerintah dan PAD.....	16
2.2.5.1 Pengeluaran Pemerintah	19
2.2.5.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan PAD	19

2.3	Kerangka Pemikiran.....	19
2.4	Hipotesis Penelitian.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....		21
3.1.	Jenis dan Cara Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.1
3.1.1.	Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.1
3.1.2.	Jenis Dan Sumber Data.....	Error! Bookmark not defined.1
3.1.3.	Metode Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.1
3.2.	Definisi Variabel Operasional.....	Error! Bookmark not defined.1
3.2.1.	Variabel terikat (Variabel Dependen)	Error! Bookmark not defined.2
3.2.2.	Variabel Bebas (Variabel Independen).....	Error! Bookmark not defined.2
3.3.	Metode Analisis.....	Error! Bookmark not defined.2
3.3.1.	Uji Metode Mackinnon, White, dan Davidson (MWD).....	Error! Bookmark not defined.3
3.3.2.	Regresi Berganda.....	Error! Bookmark not defined.3
3.3.3.	Koefisien Determinasi (R^2).....	24
3.4.	Pengujian Hipotesis.....	24
3.4.1.	Uji Simultan (Uji-F).....	25
3.4.2.	Uji Parsial (Uji-t).....	26
3.5.	Uji Asumsi Klasik.....	27
3.5.1.	Uji Normalitas.....	27
3.5.2.	Uji Heteroskedastisitas.....	27
3.5.3.	Uji Multikolinearitas.....	27
3.5.4.	Uji Autokorelasi.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		29
4.1	Analisis Hasil Regresi dan Pengujian Hipotesis.....	29
4.1.1	Pemilihan Model Regresi.....	29
4.1.2	Hasil Estimasi.....	33
4.1.3	Koefisien Determinasi (R^2).....	34
4.1.4	Pengujian t-statistik.....	Error! Bookmark not defined.4
4.1.5	Pengujian f-statistik.....	Error! Bookmark not defined.4
4.1.4	Interpretasi Hasil Regresi).....	Error! Bookmark not defined.4

4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	36
4.2.1 Uji Autokorelasi LM test.....	36
4.2.2 Uji Heterokedasitas.....	37
4.2.3 Uji Normalitas.....	37
4.2.4 Uji Multikolinearitas.....	38
4.3 Analisis Ekonomi	42
BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI	45
5.1 Kesimpulan.....	45
5.2 Implikasi.....	45
Daftar Pustaka	Error! Bookmark not defined.



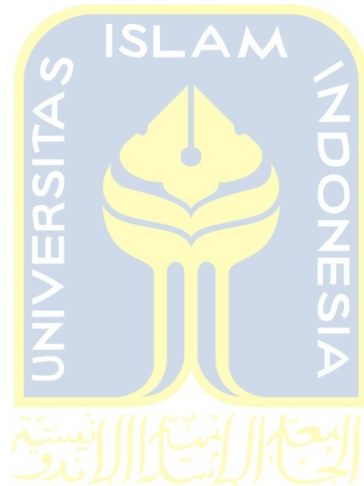
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 PMA dan PMDN di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006-2020.....	3
Tabel 1.2 Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006-2020..	5
Tabel 4.1 Hasil uji MWD Model Linear.....	32
Tabel 4.2 Hasil Uji MWD Model Log Linear.....	33
Tabel 4.3 Hasil Estimasi Model Log Linear.....	33
Tabel 4.4 Hasil Uji t-statistik.....	35
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi.....	39
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	39
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas.....	40
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas.....	40



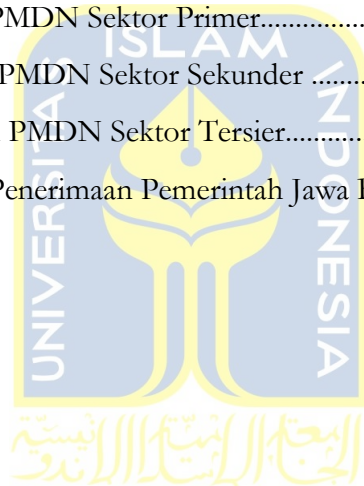
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat.....	2
Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Jawa Barat Tahun 2006-2020.....	4
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	19
Gambar 4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat.....	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran – Lampiran	54
Lampiran I. Data Penelitian.....	55
Lampiran II. Hasil Estimasi Linear.....	56
Lampiran III. Realisasi PMA Sektor Primer.....	57
Lampiran IV. Realisasi PMA Sektor Sekunder.....	58
Lampiran V. Realisasi PMA Sektor Tersier.....	59
Lampiran VI. Realisasi PMDN Sektor Primer.....	60
Lampiran VII. Realisasi PMDN Sektor Sekunder	68
Lampiran VIII. Realisasi PMDN Sektor Tersier.....	70
Lampiran IX. Realisasi Penerimaan Pemerintah Jawa Barat.....	72



ABSTRAK

Pendapatan asli daerah dijadikan tolak ukur ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi yang besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah didapatkan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Seluruh provinsi di Indonesia berusaha untuk terus meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah masing-masing. Model yang paling tepat dalam penelitian ini yaitu uji *Mackinnon, White and Davidson* (MWD), model dalam rentang waktu tahun 2006 – 2020 dengan menggunakan variabel PMA, PMDN, Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan R-square sebesar 0,9734 atau 97,34% bahwa variabel PAD dipengaruhi oleh variabel independen yaitu PMA, PMDN, Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah. Secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Secara parsial variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. PMA berpengaruh terhadap variabel dependen dan PMDN berpengaruh terhadap variabel dependen. 0,981802 memiliki arti bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu dijelaskan oleh PMA, PMDN, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah sebesar 98,18% sedangkan sisanya sebesar 1,82% dijelaskan oleh variabel lain di luar mode

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beragam suku, ras, budaya dan agama. Keberagaman tersebut membutuhkan kebijakan pemerintah yang efektif dan efisien agar tercipta pemerataan pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2000, pelaksanaan otonomi daerah secara bertahap mulai dijalankan. Melalui hal tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur rumah tangganya sendiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat.

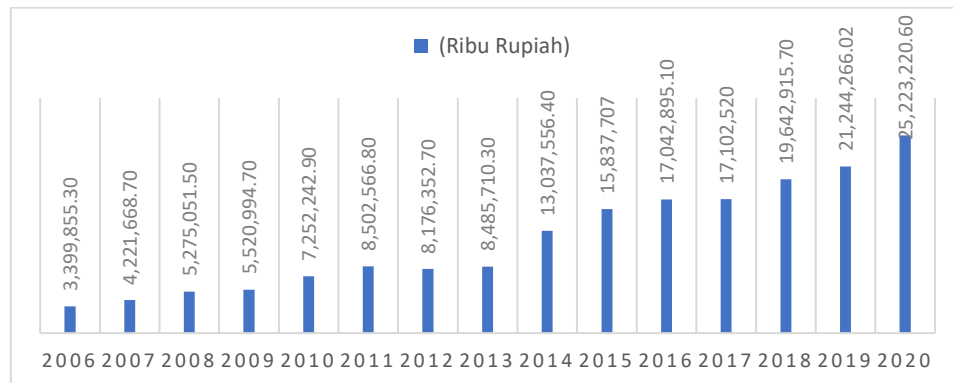
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Otonomi Daerah merupakan suatu hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah juga merupakan usaha pemberdayaan daerah dalam hal penentuan kebijakan daerah yang menganut pada keutamaan dan pengembangan daerah tersebut (Widada, 2012). Keberadaan otonomi daerah ini mendefinisikan bahwa pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri daerahnya sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pemerintah daerah harus bisa mengelola dan mempertanggungjawabkan kebijakan daerah kepada masyarakat. Tujuan adanya otonomi daerah yaitu daerah diharuskan untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sehingga bisa membantu membiayai kebutuhan daerah tersebut.

PAD (Pendapatan Asli Daerah) saat ini dijadikan tolak ukur ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat. Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) menyumbangkan sumbangan yang besar terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa sumber pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah didapatkan dari pajak daerah, retribusi daerah, jumlah kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan yang sah. Seluruh provinsi di Indonesia berusaha untuk terus meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah masing-masing, salah satunya

Provinsi Jawa Barat. Berikut ini merupakan grafik dari Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2006 hingga 2020 :

Gambar 1.1

**Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2006-2020 (Ribuan Rupiah)**



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Apabila dilihat dari grafik di atas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat periode tahun 2006 hingga 2020 terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini menunjukkan hasil yang positif bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak bergantung pada pemerintah pusat. Melihat data dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar bersumber dari pajak daerah dengan nilai realisasi sebesar 17 miliar rupiah. Pemerintah perlu untuk terus meningkatkan pendapatan yang dapat meningkatkan PAD Provinsi Jawa Barat.

Salah satu faktor yang diyakini dapat memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni penanaman modal. Menurut Kurniawan dkk (2017) pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang meningkat karena dipengaruhi oleh investasi swasta atau penanaman modal. Adanya penanaman modal di suatu daerah akan berpotensi terhadap peningkatan pendapatan pajak bagi daerah tersebut, selain itu terdapat hasil retribusi daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penanaman modal dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Feriyanto (2016) investasi merupakan kebutuhan pokok dalam suatu perekonomian, melalui investasi negara dapat membangun infrastruktur yang dapat mendorong perekonomian. Pada penelitian ini investasi swasta ditunjukkan oleh variabel Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing dengan lokasi usaha berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan berada di Indonesia. Keduanya memiliki persamaan yakni berkontribusi untuk perekonomian Indonesia.

Berikut ini merupakan perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Jawa Barat :

Tabel 1.1
Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006-2020

Tahun	PMA (Juta US\$)	PMDN (Milyar Rupiah)
2006	1.619,30	5.314,40
2007	1.326,90	11.347,90
2008	2.552,20	4.289,50
2009	1.934,40	4.724,90
2010	1.692,00	15.799,80
2011	3.839,40	11.194,30
2012	4.210,70	11.384,00
2013	7.214,90	9.006,10
2014	6.562,00	18.726,90
2015	5.738,70	26.272,90
2016	5.470,90	30.360,20
2017	5.142,90	38.390,60
2018	5.573,50	42.278,20

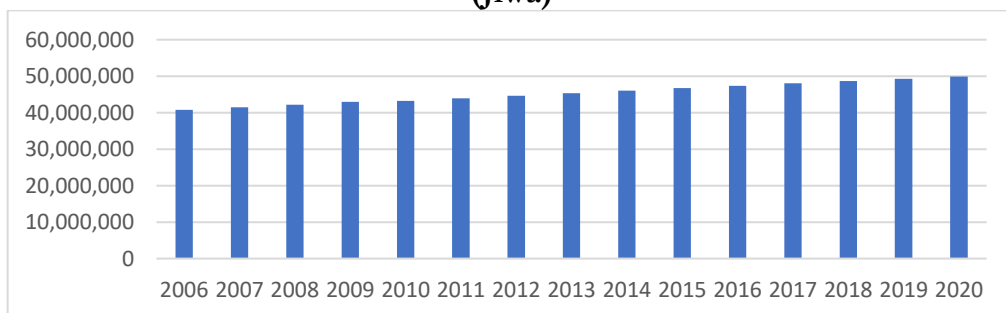
2019	5.881,00	49.284,20
2020	4.793,70	51.400,50

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat

Menurut tabel di atas dapat dilihat bahwa peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) cenderung fluktuatif. Provinsi Jawa Barat mendapatkan suntikan Penanaman Modal Asing (PMA) terbesar dari Negara Jepang dan Singapura. Pada tahun 2020 terdapat penurunan PMA dari Negara Jepang sebesar 35.02%. sedangkan di sisi lainnya, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2014 hingga 2020.

Peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk dapat mengakibatkan meningkatnya masalah kemiskinan dan pembangunan akan semakin melambat (Todaro, 2008). Permasalahan lain juga timbul akibat pemerintah daerah hanya terfokus pada daerah perkotaan akibat dari tingginya peningkatan perpindahan dari desa ke kota. Namun, peningkatan jumlah penduduk juga dapat memberikan dampak baik bagi suatu daerah. Apabila penduduk daerah tersebut memiliki kemampuan serta pada usia produktif maka akan membantu mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan produksi barang dan jasa. Berikut ini merupakan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat :

Gambar 1.2
Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2006-2020
(Jiwa)



Sumber : B P S Provinsi Jawa Barat

Dapat dilihat grafik di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk mengalami peningkatan pada kurun waktu 2006 hingga 2020. Peningkatan ini memberikan dampak yang positif bagi pemerintah daerah. Penambahan jumlah penduduk

merupakan suatu hal yang dibutuhkan karena penduduk merupakan unsur penting yang dapat merangsang perekonomian daerah. Di sisi lain, peningkatan jumlah penduduk maka dapat diartikan terjadi peningkatan pula pada jumlah angkatan kerja. Apabila angkatan kerja tinggi dan lapangan kerja mencukupi maka akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain dari sisi penduduk, pengeluaran pemerintah secara tidak langsung memberikan dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengeluaran pemerintah sendiri adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat dan diatur penggunaannya oleh pemerintah agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah dapat mendorong perekonomian daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah maka diharapkan dapat meninggikan pula Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berikut ini realisasi pengeluaran pemerintah tahun 2006 hingga tahun 2020 :

Tabel 1.2
Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006-2020
(Ribu Rupiah)

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Ribu Rupiah)
2006	4.907.738
2007	5.341.776
2008	6.110.960
2009	8.193.614
2010	9.020.608
2011	10.295.570
2012	16.922.477
2013	18.396.745
2014	20.797.988
2015	28.366.703
2016	31.344.462
2017	24.054.880
2018	36.482.715

2019	39.199.187
2020	46.095.261

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah rata-rata mengalami peningkatan. Meskipun pada tahun 2017 terdapat penurunan pengeluaran pemerintah. Namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan pengeluaran pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), misalnya dengan peningkatan fasilitas publik dan juga peningkatan sarana dan prasarana yang dapat membantu produktivitas serta kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pengeluaran pemerintah tertinggi pada tahun 2020 di mana terjadi Pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia, sehingga pemerintah daerah menggelontorkan dana yang cukup tinggi utamanya untuk bidang kesehatan.

Berdasarkan uraian yang ditampilkan dapat disimpulkan bahwa pentingnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk suatu daerah. Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian secara empiris mengenai beberapa faktor yang dapat memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan judul sebagai berikut:

“PENGARUH PMA, PMDN, JUMLAH PENDUDUK DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2006-2020”

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh PMA terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh PMDN terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat?
5. Bagaimana pengaruh variabel-variabel Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN, Jumlah Penduduk, Pengeluaran

Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.2.1 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh PMA terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat.
2. Menganalisis pengaruh PMDN terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat.
3. Menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat.
4. Menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat.
5. Menganalisis pengaruh variabel-variabel Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN, Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

1.2.2 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara empiris terkait pengaruh PMA, PMDN, Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006-2020.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya serta dapat memperkuat hasil penelitian sebelumnya.

1.3 Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada pendahuluan terdapat beberapa sub bab yang menjelaskan pada Latar Belakang, Masalah Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Pada kajian pustaka dan landasan teori terdapat beberapa sub bab yang menjelaskan mengenai Kajian Pustaka, Landasan Teori, hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis Penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

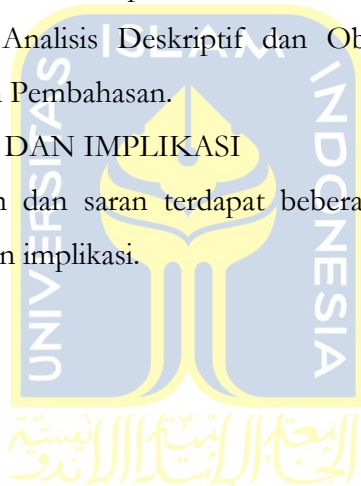
Pada metode penelitian terdapat beberapa sub bab yang menjelaskan mengenai Variabel Penelitian dan Definisi Operasional, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, serta Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada hasil analisis dan pembahasan terdapat beberapa sub bab yang menjelaskan mengenai Analisis Deskriptif dan Objek Penelitian, Analisis Data, Pengujian Hipotesis, dan Pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Pada kesimpulan dan saran terdapat beberapa sub bab yang menjelaskan mengenai kesimpulan dan implikasi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Penelitian oleh Santosa dan Rahayu (2005) yang berjudul “Analisis Pendapatan Asli Daerah (Pad) dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri” dengan menggunakan alat uji regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa PDRB memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, Jumlah Penduduk memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, dan Pengeluaran Pemerintah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Penelitian oleh Hikmahyanti (2021) yang berjudul “Faktor-faktor yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Per Kabupaten Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2018” dengan memakai alat uji data panel. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa secara simultan Jumlah Penduduk, PDRB, Jumlah Industri dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Sedangkan secara parsial, Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, PDRB pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, Jumlah Industri pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, dan Pengeluaran Pemerintah pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Penelitian oleh Hertanto dan Sriyana (2011) yang berjudul “Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota” dengan alat uji regresi data panel. Berdasarkan penelitian ini menghasilkan bahwa secara parsial Jumlah Industri pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, Jumlah Penduduk pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, dan PDRB pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Sedangkan secara simultan diperoleh hasil bahwa Jumlah Industri, Jumlah Penduduk dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Penelitian oleh Gitaningtyas dan Taufik (2014) yang berjudul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk dan Investasi Swasta terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur” dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Pada hasil penelitian ini memperlihatkan variabel Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Investasi Swasta

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan PDRB, akan dapat meninggikan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga akan berdampak pada peningkatan realisasi PAD di Provinsi Jawa Timur. Pada variabel jumlah penduduk, semakin bertambah jumlah penduduk maka akan semakin besar jumlah pungutan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga akan meningkatkan PAD. Selain itu, semakin meningkatnya investasi swasta akan semakin meningkat pula pajak dan retribusi daerah sehingga akan meninggikan PAD di Provinsi Jawa Timur.

Penelitian oleh Sangabuana (2008)

Penelitian oleh Sangabuana (2008) yang berjudul “Analisis Pengaruh Investasi Swasta terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Timur 1996-2006” dengan menggunakan metode analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Investasi Swasta berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD.

Penelitian oleh Rosmalia, Iskandar dan Fitriadi (2014) yang berjudul “Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan” dengan menggunakan metode *path analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan Investasi berpengaruh signifikan positif terhadap PDRB, Tenaga Kerja berpengaruh signifikan positif terhadap PDRB, PDRB berpengaruh signifikan positif terhadap PAD, , Investasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD, Tenaga Kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Variabel Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Santosa dan Rahayu (2005), Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri	PDRB, Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, PAD.	Regresi Linear Berganda	PDRB pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, Jumlah Penduduk pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, Pengeluaran Pemerintah pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.
2.	Hikmahyanti (2021), Faktor-faktor yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Per Kabupaten Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2018.	Jumlah Penduduk, PDRB, Jumlah Industri, Pengeluaran Pemerintah, PAD	Regresi Data Panel	Jumlah Penduduk pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, PDRB pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, Jumlah Industri pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, dan Pengeluaran Pemerintah pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.
3.	Herrtanto dan Sriyana (2011), Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota.	Jumlah Industri, Jumlah Penduduk, PDRB, PAD	Regresi Data Panel	Jumlah Industri pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan

				terhadap PAD, dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.
4.	<p>Gitaningtyas dan Taufik (2014).</p> <p>Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk dan Investasi Swasta terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.</p>	<p>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Investasi Swasta dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p>	<p>Analisis menggunakan regresi linear berganda.</p>	<p>Secara parsial PDRB pengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD, Investasi Swasta pengaruh signifikan dan positif terhadap PAD. Sedangkan secara simultan variabel PDRB, Jumlah Penduduk, dan Investasi Swasta berpengaruh terhadap PAD.</p>
5.	<p>Sangabuana (2008)</p> <p>Analisis Pengaruh Investasi Swasta terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Timur 1996-2006.</p>	<p>PAD, Investasi Swasta/PMA</p>	<p>Regresi Data Panel</p>	<p>Investasi Swasta berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD.</p>
6.	<p>Rosmalia, Iskandar dan Fitriadi (2014),</p> <p>Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) dan</p>	<p>Investasi, Tenaga Kerja, PDRB, PAD.</p>	<p>Path Analysis</p>	<p>Investasi berpengaruh signifikan positif terhadap PDRB, Tenaga Kerja berpengaruh signifikan positif</p>

	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan		terhadap PDRB, PDRB berpengaruh signifikan positif terhadap PAD, , Investasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD, Tenaga Kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD.
--	--	--	---

Penelitian terdahulu soal faktor-faktor yang dapat memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki ciri khas dengan penelitian ini. Yang beda dari penelitian ini yakni pada metode penelitian, periode tahun penelitian, variabel independen, serta daerah penelitian. Metode penelitian menggunakan metode analisis uji MWD (*Mackinnon, White and Davidson*) dengan menggunakan jenis data time series pada tahun penelitian 2006 hingga 2020. Variabel independen yang digunakan yakni Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah. Pada penelitian ini fokus pada Provinsi Jawa Barat.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerapan otonomi daerah mendorong setiap daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencorakkan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor penting dalam suatu daerah. Keberadaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kemandirian suatu daerah dalam mencukupi kebutuhan masyarakat daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga merupakan sumber keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah.

Menurut Pamungkas (2019) peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik agar mencapai *good governance*. Dalam hal ini pemerintah daerah terus mengupayakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan terbesar dari tiap daerah rata-rata melalui pajak daerah.

Pendapatan daerah merupakan sektor penting yang dapat menentukan pembiayaan pembangunan pada daerah tersebut. Berikut ini merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

a. Pajak Daerah

Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau instansi kepada daerah yang berunsur menuntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa Pajak dan Retribusi Daerah. Pajak daerah digunakan untuk menyejahterakan rakyat dan tidak mendapat upah secara langsung.

b. Retribusi Daerah

Tarif daerah untuk penyetoran atau jasa atau diberikannya izin tertentu yang khusus atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk urusan masyarakat. Terdapat tiga golongan retribusi daerah seperti retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

c. Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Materi kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

d. Lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan daerah yang bukan berasal dari pendapatan daerah dan dana perimbangan, masuk dalam kategori penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, potongan dan selisih nilai tukar, pendapatan bunga deposito, penerimaan jasa biro, dan desakan ganti rugi dan komisi menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.2.2 Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.2.2.1 Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman modal di Indonesia terdiri atas dua jenis yakni Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Keduanya memiliki persamaan tujuan untuk mendukung kemajuan ekonomi nasional. Meskipun memiliki tujuan yang sama, terdapat beberapa perbedaan PMA dan PMDN utamanya pada subjek penanaman modal. Penanaman Modal Asing dilakukan oleh investor asing yang merupakan warga negara asing, badan usaha asing dan atau pemerintah asing. Sedangkan, PMDN dilakukan oleh investor dalam negeri.

Menurut Jhingan (1996) Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak swasta di negara asal pemilik modal atau pemilik modal suatu negara ke negara lain atas nama pemerintah negara pemilik modal. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Penanaman Modal Asing (PMA) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Apabila investor asing ingin melakukan penanaman modal di Indonesia diwajibkan untuk mempekerjakan masyarakat Indonesia terlebih dahulu. Selain itu, pihak perekrut diwajibkan untuk melakukan pelatihan kerja bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan dipekerjakan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan sarana menanam modal untuk diupayakan oleh investor dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Keberadaan investor yang merupakan Warga Negara Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) misalkan melalui penyerapan tenaga kerja. Tidak hanya dari sisi investor, pemerintah daerah juga harus terus melakukan usaha agar investor tertarik untuk melakukan penanaman modal di daerah tersebut.

2.2.2.2 Hubungan Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mankiw (2007) investasi merupakan salah satu agar dapat dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menargetkan perekonomian serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat pada jangka panjang. Pada penelitian ini, investasi ditunjukkan oleh Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Keduanya memiliki tujuan yang sama yakni harus berkontribusi dalam mendorong perekonomian daerah. Peningkatan penanaman modal pada suatu daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berkorelasi positif terhadap PAD, apabila terjadi peningkatan PMA dan PMDN maka akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitu pula sebaliknya.

Peningkatan kegiatan penanaman modal dapat mendorong pendapatan kepada pemerintah melalui pajak dan retribusi daerah. Selain itu, dengan adanya kegiatan penanaman modal diharapkan dapat menyerap jumlah angkatan kerja yang ada di daerah. Apabila angkatan kerja di daerah memiliki kemampuan dan keterampilan maka akan dapat menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.2.4 Jumlah Penduduk dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.2.4.1 Jumlah Penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk merupakan seluruh masyarakat yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi memiliki tujuan untuk menetap, sedangkan jumlah penduduk sendiri merupakan jumlah dari seluruh masyarakat yang berdomisili selama 6 bulan atau lebih dan berdomisili kurang dari 6 bulan yang bertujuan untuk menetap. Jumlah penduduk sendiri merupakan total dari penduduk laki-laki ditambah dengan penduduk perempuan. Penduduk dapat memengaruhi penerimaan daerah dengan perannya dalam menjalankan perekonomian. Menurut Sukirno (2003) apabila terdapat peningkatan jumlah penduduk maka akan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

2.2.4.2 Hubungan Jumlah Penduduk dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Perwira dan Widanta (2014) menjelaskan bahwa jumlah penduduk adalah salah satu faktor penentu adanya disparitas pendapatan antar daerah. Peningkatan jumlah penduduk adalah suatu hal yang diperhatikan pemerintah. Jumlah penduduk mempunyai arti korelasi yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adanya peningkatan jumlah penduduk maka akan mendorong perekonomian serta dapat merangsang pembangunan daerah. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk juga akan meningkatkan pula pungutan pajak sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah.

Bertambahnya jumlah penduduk berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja (Pamungkas, 2019). Apabila terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja maka dapat meningkatkan produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Selain itu, dengan adanya produktivitas suatu daerah dapat meningkatkan realisasi Perolehan Asli Daerah (PAD). Sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu daerah harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Hal ini dikarenakan penduduk melalui tenaga kerja menjadi faktor utama dalam perekonomian suatu daerah.

2.2.5 Pengeluaran Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.2.5.1 Pengeluaran Pemerintah

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengeluaran pemerintah merupakan jenis output pemerintah dikurangi nilai output untuk pembentukan modal sendiri dikurangi nilai penjualan barang/jasa ditambah dengan nilai barang/jasa yang dibeli atau dengan harga yang tidak diberikan secara signifikan. Pemerintah memiliki peranan yang lebih besar dalam pengelolaan perekonomian (Todaro, 1997). Pemerintah juga harus dapat memberikan output dari hasil pengelolaan ekonominya. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk peningkatan fasilitas publik dan sarana prasarana publik.

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang pengeluaran pemerintah, seperti teori Adolf Wagner. Teori Adolf Wagner menjelaskan bahwa dalam suatu perekonomian terjadi peningkatan pendapatan per kapita maka secara relatif dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah karena pemerintah perlu mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan dan lainnya (Prasetya, 2012). Garis besar pada teori Adolf Wagner yakni pengeluaran pemerintah akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya peran pemerintah dalam perekonomian.

2.2.5.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Besarnya pengeluaran pemerintah menunjukkan bahwa meningkatnya pembiayaan daerah. Pemerintah daerah melalui kebijakan fiskal dapat menggunakan variabel pengeluaran pemerintah untuk mendorong perekonomian. Pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah haruslah bersifat dapat dimanfaatkan jangka panjang dan dapat dinikmati seluruh masyarakat. Contohnya pada saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang gencar untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Hal ini disambut baik oleh masyarakat karena dengan adanya infrastruktur yang memadai maka dapat memberikan peranan esensial dalam aktivitas perekonomian jangka panjang. Pengeluaran pemerintah memiliki korelasi yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Konsumsi pemerintah yang digunakan untuk pembiayaan daerah secara efektif dan efisien akan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah maka dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitu sebaliknya.

2.3 Kerangka Pemikiran

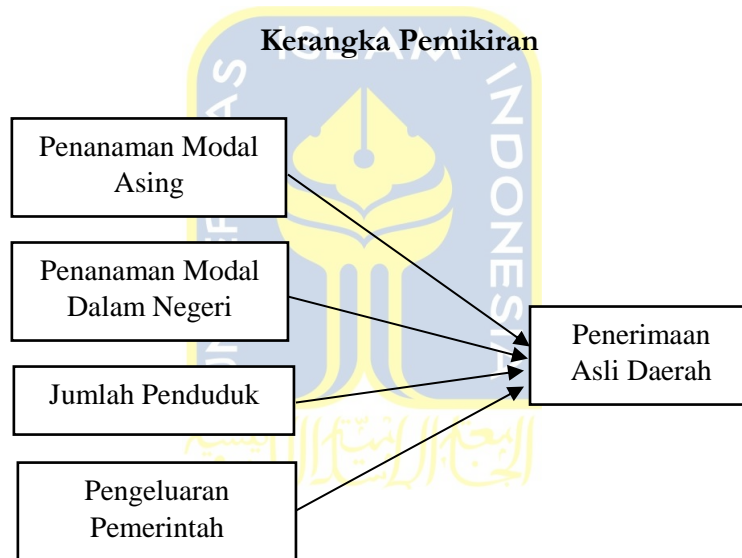
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari penerimaan asli dari suatu daerah. Peningkatan PAD akan memberikan pengaruh yang besar bagi APBD utamanya pada sisi pendapatan daerah. Oleh karena itu, suatu daerah harus mengetahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi PAD utamanya yang dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Gitaningtyas dan Taufik, 2014). Pada penelitian ini ada temuan pada variabel PMA, PMDN, Jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah faktor yang dapat memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat.

Variabel independen pertama yakni Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan suatu kegiatan menanam modal oleh investor asing. Penanaman modal dapat menggunakan modal asing seluruhnya atau bergabung dengan modal dalam negeri. Selain PMA, terdapat pula Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang merupakan kegiatan menanam modal oleh investor dalam Negeri. Pada penelitian ini PMDN digunakan sebagai variabel independen kedua. Variabel PMA dan PMDN memiliki efek di masa yang akan datang. Dalam hal ini, melalui peningkatan penanaman modal diharapkan akan meningkatkan pula pendapatan daerahnya.

Variabel independen ketiga yakni jumlah penduduk. Jumlah penduduk sendiri merupakan jumlah masyarakat yang bertempat tinggal dan memiliki pekerjaan di suatu wilayah serta diakui oleh negara secara sah. Setiap daerah tiap tahunnya memiliki jumlah penduduk yang berubah-ubah. Sehingga dengan adanya peningkatan jumlah penduduk diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan daerahnya. Variabel independen keempat yakni pengeluaran pemerintah. Adanya realisasi pengeluaran pemerintah yang meningkat diharapkan juga akan meningkatkan fasilitas publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Apabila fasilitas publik terpenuhi maka diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Sehingga dapat disimpulkan kerangka pemikiran dari penelitian ini yakni sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah dijabarkan di atas maka diambil hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga variabel PMA Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
2. Diduga variabel PMDN Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
3. Diduga variabel Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
4. Diduga variabel Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
5. Diduga variabel-variabel Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN, Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah secara simultan memiliki pengaruh bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data

3.1.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini yakni penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan terikat secara empiris. Data dari penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat. Data sekunder dipilih penulis untuk mengetahui data Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat.

3.1.2 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis *time series*. Data yang digunakan merupakan data deret waktu dari tahun 2006 hingga tahun 2020. Metode ini digunakan penulis untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat pada waktu tertentu. Informasi yang didapatkan dalam penelitian ini bersumber dari jurnal, dokumentasi, catatan, literatur dan teknik lain yang mendukung penelitian ini. Seluruh variabel pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat.

3.2 Definisi Variabel Operasional

3.2.1 Variabel Terikat

Variabel terikat atau variabel dependen (Y) dalam penelitian ini yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat tahun 2006 hingga tahun 2020. Di penelitian ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggunakan satuan ribu rupiah. Variabel dependen ini adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas.

3.2.2 Variabel Bebas

Variabel bebas atau variabel independen (X) merupakan variabel dapat bisa memengaruhi variabel terikat. Terdapat 4 variabel independen dalam penelitian ini, yakni :

1. Penanaman Modal Asing (X1)

Variabel X1 penelitian ini yakni Penanaman Modal Asing (PMA). Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing bertempat di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2006 hingga tahun 2020 dengan menggunakan satuan Juta US\$. Sumber data variabel ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat.

2. Penanaman Modal Dalam Negeri (X2)

Variabel X2 dalam penelitian ini yakni Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh investor dalam negeri dan dilaksanakan di dalam negeri. Pada penelitian ini menggunakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2006 hingga tahun 2020 dengan menggunakan satuan Miliar Rupiah. Sumber data variabel ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat.

3. Jumlah penduduk (X3)

Variabel X3 pada penelitian ini yakni Jumlah Penduduk. Besarnya jumlah penduduk terus berubah tiap waktunya. Pada penelitian ini menggunakan jumlah penduduk tahun 2006 hingga tahun 2020 dengan menggunakan satuan Jiwa. Sumber data variabel ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

4. Pengeluaran pemerintah (X4)

Variabel X4 dalam penelitian ini yakni pengeluaran pemerintah. Data dalam penelitian ini menggunakan realisasi pengeluaran pemerintah. Pada penelitian ini menggunakan pengeluaran pemerintah tahun 2006 hingga tahun 2020 dengan menggunakan satuan Ribu Rupiah. Sumber data variabel ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

3.3 Metode Analisis

3.3.1 Uji *Mackinnon, White and Davidson* (MWD)

Pada penelitian ini menguji dengan alat MWD *Mackinnon, White and Davidson* (MWD) untuk mengetahui estimasi model terbaik. Dalam pemilihan model terdapat dua model yakni model log linear dan linear. Adapun persamaan matematis yang digunakan untuk model regresi linear atau log linear adalah sebagai berikut :

$$\text{Linear} \quad : Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$\text{Log Linear} \quad : \text{Log } Y = \beta_0 + \beta_1 \log X_1 + \beta_2 \log X_2 + \beta_3 \log X_3 + \beta_4 \log X_4 + e$$

Estimasi persamaan dari model linear yakni sebagai berikut :

$$\text{Linear} : Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 Z_1 + e$$

Probabilitas pada nilai Z1 digunakan untuk mengetahui apakah model yang tepat linear atau log linear. Apabila nilai probabilitas Z1 signifikan maka model terbaik adalah model linear. Apabila nilai probabilitas Z1 tidak signifikan maka model terbaik adalah model log linear.

Estimasi persamaan dari model log linear yakni sebagai berikut :

$$\text{Log Linear} : Y = \beta_0 + \beta_1 \log X_1 + \beta_2 \log X_2 + \beta_3 \log X_3 + \beta_4 \log X_4 + e$$

Sama halnya dengan Z1, nilai probabilitas Z2 untuk menentukan apakah model terbaik log linear atau model linear. Jika nilai probabilitas Z2 signifikan maka model terbaik adalah model log linear. Sedangkan apabila nilai probabilitas Z2 tidak signifikan maka model terbaik adalah model linear. Jika pada hasil penelitian nilai Z1 dan nilai Z2 signifikan maka dalam penelitian dapat memilih model linear ataupun model log linear.

3.3.2 Regresi Berganda

Menurut Widarjono (2009), regresi berganda merupakan regresi yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS).

Dalam penelitian ini didapatkan hasil persamaan OLS adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e_i$$

Keterangan :

- Y : Pendapatan asli daerah (PAD)
 β_0 : Intersep
 β_1 - β_4 : Koefisien regresi
X1 : Penanaman Modal Asing (PMA)
X2 : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
X3 : Jumlah penduduk
X4 : Pengeluaran pemerintah
 e_i : *error*

3.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Value koefisien determinasi adalah suatu hasil indikator yang menunjukkan besar donasi dari variabel eksogen terhadap variabel endogen (Sugiarto, 2006). Dalam kata lain, koefisien determinasi merupakan hitungan yang dipakai untuk menakar persentase atau proporsi dari variasi total variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh model regresi. Kesimpulan hasil koefisien determinasi ditunjukkan dalam satuan persen. Semakin besar nilai R-squared maka semakin besar variabel independen dalam memengaruhi variabel dependen.

3.4 Pengujian Hipotesis

3.4.1 Uji F statistik

Pada pengujian F statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama dalam memengaruhi variabel dependen. Hipotesis penelitian pada uji f statistik penelitian ini sebagai berikut :

1. $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, artinya PMA, PMDN, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat.
2. $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$, artinya PMA, PMDN, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah secara bersamaan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat.

Pengambilan keputusan yakni guna mengumpamakan nilai probabilitas f statistik dengan alfa sebesar 5%. Jikalau nilai probabilitas lebih besar dari alfa maka gagal

menolak H_0 . Sedangkan jika value probabilitas lebih kecil dari alfa maka menolak hipotesis nol.

3.4.2 Uji t statistik

Pengujian t statistik bertujuan guna mencari tahu pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Caranya dengan membandingkan tingkat signifikansi (α) yang digunakan dengan nilai probabilitas t-statistik atau p-value.

Jika p-value < tingkat signifikansi (α) maka menolak H_0 , artinya variabel independen secara individu memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika p-value > tingkat signifikansi (α) maka gagal menolak H_0 , artinya variabel independen secara individu tidak pengaruh terhadap variabel dependen. Sehingga model hipotesis untuk uji t dapat dijelaskan, yakni:

1. Hipotesis satu arah (*One-Tailed*)

Pada hipotesis satu arah, penolakannya berada di salah satu sisi, maka itu ada di posisi kanan (positif) atau kiri (negative). Karena daerah tidak dibagi menjadi dua sisi maka batas daerah penolakan sama sebesar 5% atau sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Berikut adalah persamaan hipotesis satu arah jika variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) memiliki hubungan positif dan signifikan :

$$H_0 : \beta_1 \leq 0$$

$$H_0 : \beta_1 > 0$$

Sedangkan berikut ini adalah persamaan hipotesis satu arah jika variabel independen (X) terhadap variabel (Y) memiliki hubungan negatif dan signifikan:

$$H_0 : \beta_1 \geq 0$$

$$H_0 : \beta_1 < 0$$

2. Hipotesis dua arah (*Two-tailed*)

Pada hipotesis dua arah, penolakannya berada pada kedua sisi, sehingga daerah penolakannya menjadi lebih kecil karena dibagi menjadi dua baik bagian kanan atau kiri. Hal ini menjadikan penolakan semakin ketatnya penolakan hipotesis

Pada penelitian ini, menggunakan menggunakan uji hipotesis satu arah seperti sebagai berikut:

1. $H_0 : \beta_1 \leq 0$, artinya variabel PMA tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat.
 $H_a : \beta_1 > 0$, artinya variabel PMA pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat.
2. $H_0 : \beta_2 \leq 0$, artinya variabel PMDN tidak pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat.
 $H_a : \beta_2 > 0$, artinya variabel PMDN pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat.
3. $H_0 : \beta_3 \leq 0$, artinya variabel jumlah penduduk tidak pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat.
 $H_a : \beta_3 > 0$, artinya variabel jumlah penduduk pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat.
4. $H_0 : \beta_4 \leq 0$, artinya variabel pengeluaran pemerintah tidak pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat.
 $H_a : \beta_4 > 0$, artinya variabel pengeluaran pemerintah pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat.

Pengambilan keputusan pada uji t statistik ini dengan mengumpamakan value probabilitas dan alfa sebesar 5%. Jikalau nilai probabilitas lebih besar dari alfa 5% maka kita gagal menolak H_0 . Sebaliknya apabila nilai probabilitas lebih kecil dari alfa 5% maka kita menolak H_0 .

3.5 Uji Asumsi Klasik

3.5.1 Uji Autokorelasi

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan korelasi dalam model. Pada penelitian ini menggunakan uji autokorelasi LM (*Lagrange Multiplier Test*). Hipotesis penelitian pada uji autokorelasi sebagai berikut :

- H_0 = Tidak terdapat hubungan autokorelasi
- H_a = Terdapat hubungan autokorelasi

Pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai probabilitas *Chi-Square* dengan alfa 5%. Jika nilai probabilitas lebih besar dari alfa maka kita gagal menolak hipotesis nol. Jikalau nilai probabilitas lebih kecil dari alfa maka kita menolak hipotesis nol.

3.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Pada uji heteroskedastisitas untuk mendapatkan jawaban apakah dalam model terdapat variabel residual yang tidak konstan. Penelitian ini menggunakan uji *white heteroskedasticity*. Pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai probabilitas *chi square* dengan alfa 5%. Apabila nilai probabilitas lebih dari alfa maka gagal menolak H_0 artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya jika nilai probabilitas kurang dari alfa maka menolak H_0 artinya terjadi heteroskedastisitas.

3.5.3 Uji Normalitas

Uji normalitas dalam pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian ini berdistribusi dengan normal atau tidak. Kesimpulan hasil regresi dari uji normalitas dengan membandingkan nilai probabilitas dengan alfa. Apabila nilai probabilitas lebih dari alfa 5% maka kita gagal menolak hipotesis nol artinya data dalam penelitian memiliki sebaran yang normal. Sebaliknya apabila nilai probabilitas kurang dari alfa 5% maka gagal menolak hipotesis nol artinya data dalam penelitian tidak normal.

3.5.4 Uji Multikolinearitas

Pada uji multikolinearitas pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai VIF dengan 10. Apabila nilai VIF kurang dari 10 maka dapat disimpulkan data penelitian tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Namun jika nilai VIF lebih dari 10 maka dapat disimpulkan terjadi korelasi antar variabel independen.



BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Hasil Regresi dan Pengujian Hipotesis

4.1.1 Pemilihan Model Regresi

Opsi model regresi dengan menggunakan Uji *Mackinnon, White and Davidson* (MWD) digunakan untuk memilih model terbaik antara model linear atau model log linear. Sehingga dalam melakukan uji MWD ini digunakan hipotesis sebagai berikut :

Ho : Y adalah fungsi linear dari variabel independen X (model linear)

H1 : Y adalah fungsi log linear dari variabel independen X (model log linear)

Adapun prosedur metode MWD adalah sebagai berikut:

1. Estimasi model linear dan dapatkan nilai prediksinya (*fitted value*) dan selanjutnya dinamai F1.
2. Estimasi model log linear dan dapatkan nilai prediksinya, dan selanjutnya dinamai F2.
3. Dapatkan nilai $Z1 = \ln F1 - F2$ dan $Z2 = \text{antilog } F2 - F1$
4. Estimasi persamaan berikut ini:

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \alpha_4 X_4 + \alpha_5 Z_1 + e$$

Jika $Z1$ signifikan secara statistik maka kita menolak hipotesis nol sehingga model yang tepat untuk dipakai adalah model log linear dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita mendapatkan jawaban hipotesis nol dan model yang tepat digunakan adalah model linear

5. Estimasi persamaan berikut:

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 \ln X_1 + \alpha_2 \ln X_2 + \alpha_3 \ln X_3 + \alpha_4 \ln X_4 + \alpha_5 Z_2 + e$$

Jika $Z2$ signifikan secara statistik maka kita menolak hipotesis alternatif dan model yang tepat untuk digunakan adalah model log linear dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis alternatif dan model yang tepat untuk digunakan adalah model linear.

Di penelitian ini, variabel dependen menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2006 hingga 2020. Variabel independen yang digunakan yakni PMA, PMDN, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah. Sehingga pada penelitian ini memiliki persamaan sebagai berikut :

- Linear $Y = \beta_0 + \beta_1 XI + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$
- Log Linear $Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Log } XI + \beta_2 \text{Log } X_2 + \beta_3 \text{Log } X_3 + \beta_4 \text{Log } X_4 + e$

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Ribu Rupiah) ; XI = PMA (juta US\$), ; X_2 = PMDN (Milyar Rupiah); X_3 = Jumlah penduduk (Ribu Jiwa) ; X_4 = Pengeluaran pemerintah (Ribu Rupiah) dan e adalah residual model regresi.

Hasil estimasi masing-masing model adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Hasil Uji MWD Model Linear

Dependent Variable: PAD

Method: Least Squares

Date: 12/17/21 Time: 18:32

Sample (adjusted): 1 15

Included observations: 15 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1803278.3	12803657	-1.408409	0.1926
PMA	132.0518	196.4433	0.672213	0.5183
PMDN	174.9949	40.16656	4.356732	0.0018
JPEND	0.479305	0.318563	1.504584	0.1667
PENG.PEM	0.190212	0.046590	4.082659	0.0027

Z1 8114746. 1847926. 4.391273 0.0017

R-squared	0.995924	Mean dependent var	11997702
Adjusted R-squared	0.993660	S.D. dependent var	6914820.
S.E. of regression	550604.4	Akaike info criterion	29.56460
Sum squared resid	2.73E+12	Schwarz criterion	29.84782
Log likelihood	-215.7345	Hannan-Quinn criter.	29.56158
F-statistic	439.8115	Durbin-Watson stat	2.363755
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil olah data Eviews 10

Berdasarkan hasil dari olah data di atas, didapatkan nilai probabilitas Z1 sebesar 0,0017 lebih kecil dari alfa sebesar 0,05 sehingga menolak H0 dan menerima Ha. Artinya, Z1 berarti model yang digunakan adalah model non linear

Sedangkan hasil dari regresi log linear uji MWD adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Hasil Uji MWD Model Log Linear

Dependent Variable: LOG(PAD)

Method: Least Squares

Date: 12/17/21 Time: 19:02

Sample (adjusted): 1 15

Included observations: 15 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	148.3689	15.94283	-9.306309	0.0000
LOG(PMA)	0.097542	0.040760	2.393082	0.0404
LOG(PMDN)	0.130891	0.032254	4.058152	0.0028
LOG(JPEND)	9.360341	0.975617	9.594280	0.0000
LOG(PENG.PEM)	0.155810	0.085089	-1.831147	0.1003
Z2	-8.89E-08	1.08E-08	-8.229906	0.0000
R-squared	0.997866	Mean dependent var		16.1264
Adjusted R-squared	0.996680	S.D. dependent var		2
S.E. of regression	0.036440	Akaike info criterion		3.49709
Sum squared resid	0.011951	Schwarz criterion		3.21387
Log likelihood	32.22824	Hannan-Quinn criter.		3.50011
F-statistic	841.4898	Durbin-Watson stat		2.00324
Prob(F-statistic)	0.000000			1

Sumber : Hasil olah data Eviews 10

Hasil olah data di atas didapatkan nilai probabilitas Z2 sebesar 0,0000 lebih kecil dari alfa sebesar 0,05 sehingga menolak H0 dan menerima Ha berdasarkan hasil regresi log linear, menunjukkan bahwa Z2 berarti model yang digunakan adalah model log linear. Nilai R2 mode linear sebesar 0.995924 lebih kecil dari R2 model log linear 0.997866, maka penelitian ini menggunakan model log linear. Hal ini menunjukkan bahwa karena model nilai R-Squared tertinggi adalah model log linear.

4.1.1 Hasil Estimasi

Tabel 4.3

Hasil Estimasi Model Log Linear

Dependent Variable: LOG(PAD)
 Method: Least Squares
 Date: 12/16/21 Time: 20:27
 Sample (adjusted): 1 15
 Included observations: 15 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	107.4756	41.96265	-2.561220	0.0283
LOG(PMA)	0.085444	0.112833	0.757255	0.4664
LOG(PMDN)	0.154851	0.088980	1.740299	0.1124
LOG(JPEND)	6.859743	2.568096	2.671139	0.0234
LOG(PENG.PEM)	0.028435	0.227395	0.125046	0.9030

R-squared	0.981802	Mean dependent var	16.1264 2
Adjusted R-squared	0.974523	S.D. dependent var	0.63240 2
S.E. of regression	0.100942	Akaike info criterion	- 1.48734 6
Sum squared resid	0.101892	Schwarz criterion	- 1.25132 9
nLog likelihood	16.15509	Hannan-Quinn criter.	- 1.48986 0
F-statistic	134.8770	Durbin-Watson stat	1.58108 0
Prob(F-statistic)	0.000000		
Kan			

Sumber : Hasil olah data Eviews 10

Dari hasil regresi log linear didapatkan hasil persamaan sebagai berikut :

$$\text{Log (Y)} = -107,4756 + 0,085444 \text{ Log (PMA)} + 0,154851 \text{ Log (PMDN)} + 6,859743 \text{ Log (Jumlah Penduduk)} + 0,028435 \text{ Log (Pengeluaran Pemerintah)} + e$$

$$R^2 = 0,981802$$

$$\text{Adjusted } R^2 = 0,974523$$

$$\text{Prob F-statistik} = 0,000000$$

4.1.2 Koefisien Determinasi

Perolehan dari estimasi ini diperoleh nilai *R-squared* sebesar 0,981802 mempunyai makna bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu dijelaskan oleh PMA, PMDN, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah sebesar 98,18% sedangkan sisanya sebesar 1,82% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.1.3 Pengujian t-statistik

Tabel 4.4
Hasil Uji t-statistik

Variabel	Prob.	Alpha (α)	Uji Signifikansi	Keterangan
LOG (PMA)	0,4664	5%	satu sisi	Tidak Signifikan
LOG(PMDN)	0,1124	5%	satu sisi	Tidak Signifikan
LOG(JPEND)	0,0234	5%	satu sisi	Signifikan
LOG(PENG.PEM)	0,9030	5%	satu sisi	Tidak Signifikan

Sumber : Hasil olah data Eviews 10

Pengujian t-statistik menggunakan perbandingan antara probabilitas dengan tingkat signifikansi atau alpha (α). Pengujian ini menggunakan Uji t satu sisi, sehingga hasil regresi di atas dapat disimpulkan :

1. Variabel Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil regresi didapatkan nilai probabilitas dari variabel PMA sebesar 0,4664 lebih besar dari alfa (α) 5% atau sebesar 0,05 maka secara statistik gagal menolak hipotesis nol. Maka dapat diartikan bahwa variabel PMA secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Provinsi Jawa Barat.

2. Variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil regresi didapatkan nilai probabilitas variabel PMDN sebesar 0,1124 lebih besar dari alfa (α) 5% atau sebesar 0,05 artinya gagal menolak hipotesis nol. Hasil dari pengujian ini memiliki arti bahwa variabel PMDN secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat.

3. Variabel Jumlah Penduduk terhadap Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil regresi didapatkan nilai probabilitas variabel jumlah penduduk sebesar 0,0234 lebih kecil dari alfa (α) 5% atau sebesar 0,05 sehingga menolak hipotesis nol. Hasil dari pengujian ini memiliki arti bahwa variabel jumlah penduduk secara individu pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Provinsi Jawa Barat.

4. Variabel Pengeluaran Pemerintah terhadap Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil regresi didapatkan nilai probabilitas variabel pengeluaran pemerintah sebesar 0,9030 lebih besar dari alfa (α) 5% atau sebesar 0,05 sehingga gagal menolak hipotesis nol. Hasil dari pengujian ini memiliki arti bahwa variabel pengeluaran pemerintah secara individu tidak pengaruh signifikan terhadap PAD di Provinsi Jawa Barat.

4.1.4 Pengujian F-statistik

1. $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$: Variabel PMA, PMDN, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama tidak pengaruh signifikan terhadap variabel PAD di Provinsi Jawa Barat
2. $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$: Variabel PMA, PMDN, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah secara bersamaan pengaruh signifikan terhadap variabel PAD di Provinsi Jawa Barat.

Melihat hasil estimasi di atas diperoleh value probabilitas f statistik sebesar 0,000000 lebih kecil dari alfa sebesar 0,1 sehingga menolak hipotesis nol. Maka dapat disimpulkan, variabel PMA, PMDN, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama pengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat.

4.1.5 Interpretasi Hasil Regresi

$$\text{Log}(Y) = -107,4756 + 0,085444 \text{Log}(PMA) + 0,154851 \text{Log}(PMDN) + 6,859743 \\ \text{Log}(\text{Jumlah Penduduk}) + 0,028435 \text{Log}(\text{Pengeluaran Pemerintah}) + e$$

1. Konstanta sebesar -107,4756

Nilai konstanta sebesar -107,4756 artinya apabila variabel PMA, PMDN, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah sama dengan nol maka PAD di Provinsi Jawa Barat tetap sebesar 107,4756%.

2. Koefisien variabel PMA sebesar 0,085444

Nilai koefisien variabel PMA sebesar 0,085444 dan tidak signifikan terhadap PAD. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PMA tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Provinsi Jawa Barat.

3. Koefisien variabel PMDN sebesar 0,154851

Nilai koefisien variabel PMDN sebesar 0,154851 dan tidak signifikan terhadap PAD. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Provinsi Jawa Barat.

4. Koefisien variabel Jumlah Penduduk sebesar 6,859743

Nilai koefisien variabel Jumlah Penduduk menunjukkan bahwa ketika jumlah penduduk naik 1 persen maka secara signifikan akan mengakibatkan peningkatan PAD di Provinsi Jawa Barat sebesar 6,859743 persen dengan asumsi variabel lain tetap.

5. Koefisien variabel Pengeluaran Pemerintah sebesar 0,028435

Nilai koefisien variabel Pengeluaran Pemerintah sebesar 0,028435 dan tidak signifikan terhadap PAD. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Provinsi Jawa Barat.

4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Autokorelasi LM Test

Tabel 4.5

Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.790535	Prob. F(2,8)	0.2277
Obs*R-squared	4.638263	Prob. Chi-Square(2)	0.0984

Sumber : Hasil olah data Eviews 10

Berdasarkan hasil olah data didapatkan nilai Prob. *Chi-Square* (2) sebesar 0,0984 lebih besar dari alfa (α) 5% atau sebesar 0,05 sehingga gagal menolak Ho. Artinya hasil regresi di atas menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

4.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.6

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

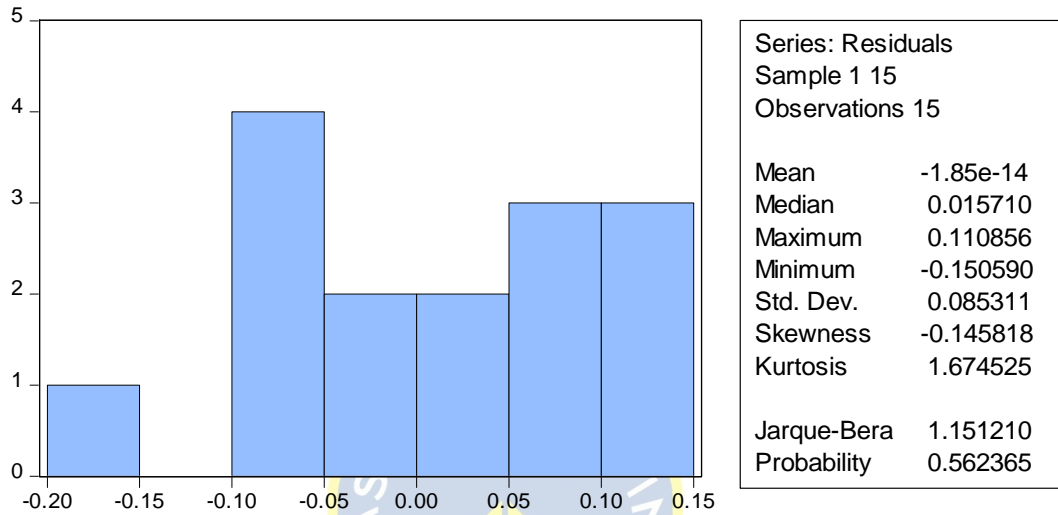
F-statistic	1.526986	Prob. F(11,3)	0.4035
Obs*R-squared	12.72691	Prob. Chi-Square(11)	0.3115
Scaled explained SS	1.907692	Prob. Chi-Square(11)	0.9988

Sumber : Hasil olah data Eviews 10

Berdasarkan hasil olah data didapatkan nilai Prob. *Chi-Square* (11) sebesar 0,3115 lebih besar dari alfa (α) 5% atau sebesar 0,05 sehingga gagal menolak Ho. Artinya hasil regresi di atas menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.2.3 Uji Normalitas

Tabel 4.7
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Hasil olah data Eviews 10

Berdasarkan hasil olah data didapatkan nilai Probabilitas sebesar 0,562365 lebih besar dari alfa (α) 5% atau sebesar 0,05 sehingga gagal menolak H_0 . Artinya sebaran data berdistribusi normal.

4.2.4 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 02/14/22 Time: 18:58

Sample: 1 16

Included observations: 15

Variable	Coefficien t	Uncentere d	Centered
Variable	Variance	VIF	VIF
C	1760.864	2592244.	NA
LOG(PMA)	0.012731	1271.849	5.748999
LOG(PMDN)	0.007917	1102.614	7.882619

LOG(JPEND)	6.595119	3017255.	37.97799
LOG(PENG.PEM)	0.051708	20981.52	41.29259

Sumber : Hasil olah data Eviews 10

Dengan melihat angka regresi di atas diperoleh nilai VIF pada variabel Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 5,748999 dan 7,882619 < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada variabel Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sedangkan variabel Jumlah Penduduk (JPEND) dan Pengeluaran Pemerintah (PENG.PEM) diperoleh nilai VIF sebesar 37,97799 dan 41,29259 > 10, sehingga bisa disimpulkan bahwa terdapat masalah multikolinearitas pada variabel Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah.

4.3 Analisis Ekonomi

Pada hasil analisis di atas maka bisa dilakukan analisis ekonomi pada masing-masing variabel sebagai berikut :

1. Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil regresi menurut penelitian ini mendapat jawaban hasil bahwa variabel Penanaman Modal Asing (PMA) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini senada dengan hasil temuan penelitian Pamungkas (2013) yang menyatakan bahwa PMA tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Namun, penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Sangabuana (2008) yang mendapatkan hasil bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penanaman Modal Asing (PMA) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimungkinkan karena investor asing memiliki minat yang tinggi pada industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain pada tahun 2006-2020. Berdasarkan hasil analisis data, PMA pada sektor sekunder (Lampiran 4) utamanya industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain lebih mendominasi daripada PMA sektor primer (Lampiran 3) dan PMA sektor tersier (Lampiran 5). Hal ini menandakan bahwa investasi

lebih dialokasikan untuk teknologi seperti mesin, bukan untuk menyerap tenaga kerja yang dapat memberikan dampak langsung terhadap pendapatan. Selain itu, penyebab PMA tidak berpengaruh signifikan adalah pengeluaran izin investasi yang terlalu berbelit-belit dan prosesnya kurang transparan serta pengawasan pemerintah dari sisi perpajakan permodalan asing masih lemah. Hal ini menyebabkan lemahnya daya pikat investor untuk masuk dan berinvestasi di Provinsi Jawa Barat. Sehingga pajak dan retribusi yang menjadi sumber utama PAD belum bisa berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil regresi pada penelitian ini dilihat hasil bahwa variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Rosmalia, Iskandar, dan Fitriadi (2014) yang mendapatkan hasil bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimungkinkan karena industri makanan mendominasi dalam PMDN di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2006-2020. Sehingga terjadi ketimpangan pada PMDN di sektor lain seperti sektor primer dan tersier yang pada dasarnya memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi (Lampiran 7). Hal ini menandakan bahwa investasi lebih dialokasikan untuk teknologi seperti mesin, bukan untuk menyerap tenaga kerja yang dapat memberikan dampak langsung terhadap pendapatan. Hal lain penyebab tidak signifikannya PMDN terhadap PAD adalah sama dengan penyebab tidak signifikannya PMA terhadap PAD. Di mana pengeluaran izin investasi yang terlalu berbelit-belit dan prosesnya kurang transparan serta pengawasan pemerintah dari sisi perpajakan permodalan asing masih lemah. Hal ini menyebabkan lemahnya daya pikat investor untuk masuk dan berinvestasi di Provinsi Jawa Barat. Sehingga pajak dan retribusi yang

menjadi sumber utama PAD belum bisa berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat. Artinya hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat (Hertanto dan Sriyana,2011).

Berdasarkan hasil analisis data, dapat dilihat melalui Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan jumlah penduduk mengalami peningkatan tiap tahunnya. Adanya peningkatan jumlah penduduk maka akan mendorong perekonomian serta dapat merangsang pembangunan daerah. Selain itu, ketika terjadi peningkatan jumlah penduduk juga akan meningkatkan pula pungutan pajak sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah.

4. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil regresi pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini didukung oleh temuan Komarilina dkk (2016) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian terdahulu oleh Hikmahyanti (2021) yang mendapatkan hasil bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada anggaran belanja daerah (APBD) dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya untuk program pembangunan dan program sosial yang mampu berdampak pada optimalisasi perekonomian. Jika dibandingkan dengan anggaran untuk program seperti pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, serta intensif pegawai negeri sipil, alokasi anggaran barang/jasa yang bersifat publik cenderung lebih kecil (Lampiran 10). Selain itu, pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan aspek lain dampaknya

tidak segera atau belum dirasakan oleh pelaku usaha atau masyarakat umum karena hal tersebut belum efektif dan memerlukan waktu untuk penyesuaian dalam kegiatan ekonomi. Hal ini berdampak pada pendapatan pajak dan retribusi yang akan diterima pemerintah, padahal sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri paling besar adalah dari pajak dan retribusi daerah.



BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Variabel Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Jawa Barat tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat. Hal ini dikarenakan investasi lebih dialokasikan untuk teknologi seperti mesin, bukan untuk menyerap tenaga kerja yang dapat memberikan dampak langsung terhadap pendapatan. Selain itu, pengeluaran izin investasi yang terlalu berbelit-belit dan prosesnya kurang transparan serta pengawasan pemerintah dari sisi perpajakan permodalan asing masih lemah. Hal ini menyebabkan lemahnya daya tarik investor untuk masuk dan berinvestasi di Provinsi Jawa Barat. Sehingga pajak dan retribusi yang menjadi sumber utama PAD belum bisa berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat. Hal ini menyebabkan PMA tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat.
2. Variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Jawa Barat tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat. Senada dengan PMA, hal ini dikarenakan pengeluaran izin investasi yang terlalu berbelit-belit dan prosesnya kurang transparan serta pengawasan pemerintah dari sisi perpajakan permodalan asing masih lemah. Hal ini menyebabkan lemahnya daya tarik investor untuk masuk dan berinvestasi di Provinsi Jawa Barat. Sehingga pajak dan retribusi yang menjadi sumber utama PAD belum bisa berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat. Hal ini menyebabkan PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat.
3. Variabel Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Barat signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat. Artinya kenaikan yang terjadi pada jumlah penduduk dapat berpengaruh secara signifikan meningkatkan PAD di Provinsi Jawa Barat. Adanya peninggian jumlah penduduk maka akan mendorong perekonomian serta dapat merangsang

pembangunan daerah. Selain itu, ketika terjadi peningkatan jumlah penduduk juga akan meningkatkan pula pungutan pajak sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. Oleh karena itu, jumlah penduduk berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat.

4. Variabel Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jawa Barat tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat. Artinya peningkatan pengeluaran pemerintah di Provinsi Jawa Barat belum tentu mampu meningkatkan PAD. Anggaran Belanja Daerah (APBN) terbagi menjadi beberapa program yang dapat mengoptimalkan perekonomian seperti pembangunan atau program sosial lainnya. Anggaran pemerintah untuk pembangunan sarana kesehatan, pendidikan dan intensif pegawai negeri sipil masih lebih besar dibandingkan untuk pengadaan barang dan jasa bersifat publik. Selain itu, pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan aspek lain dampaknya tidak segera atau belum dirasakan oleh pelaku usaha atau masyarakat umum karena hal tersebut belum efektif dan memerlukan waktu untuk penyesuaian dalam kegiatan ekonomi. Sehingga hal ini yang menyebabkan Pengeluaran Pemerintah tidak signifikan terhadap PAD.

5.1 Implikasi

Berdasarkan analisis pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2006-2020 berikut ini adalah implikasinya:

1. Penanaman Modal Asing (PMA) tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat. Meningkatnya penanaman modal di suatu daerah mampu mendorong PAD melalui pajak dan retribusi. Oleh karena itu, hal ini dapat dijadikan evaluasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dapat menarik minat investor asing berinvestasi di Jawa Barat. Selain itu, pemerintah perlu menumbuhkan daya tarik investor asing terhadap berbagai sektor produktif yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) seperti industri pengolahan, sektor informasi, sektor komunikasi, serta transportasi dan konstruksi.

2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tertinggi di Provinsi Jawa Barat adalah pada industri makanan, diharapkan hal ini juga dapat memicu industri produktif lain yang dapat mendorong penerimaan PAD seperti industri hotel dan restoran, konstruksi, informasi, komunikasi dan lain-lain. Meningkatnya investasi pada sektor-sektor produktif lain dapat membantu meningkatnya PAD bagi Provinsi Jawa Barat. Adanya kegiatan penanaman modal diharapkan mampu menyerap jumlah angkatan kerja yang ada di daerah. Apabila Angkatan kerja di daerah memiliki kemampuan dan keterampilan maka akan dapat menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Jumlah Penduduk signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menjadikan sinyal bagi pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat untuk mengoptimalkan dan mengelola potensi masyarakat dengan baik. Penduduk dapat memengaruhi penerimaan daerah dengan perannya dalam menjalankan perekonomian. Langkah yang dapat dilakukan pemerintah adalah membekali penduduknya dengan berbagai kompetensi *soft skill* dan *hard skill*, hal ini dapat juga direalisasikan melalui sistem pendidikan.
4. Pengeluaran Pemerintah tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu mengkaji kembali terkait alokasi belanjanya. Pengeluaran pemerintah yang dilakukan secara efektif dan efisien dapat memberikan kontribusi terhadap PAD. Selain itu, pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah harus dapat dimanfaatkan jangka panjang dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. (2021) “Jumlah Pendapatan Asli Daerah di Jawa Barat”. <https://opendata.jabarprov.go.id/> Diakses 15 Desember 2021
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. (2021) “Jumlah Pengeluaran Pemerintah di Jawa Barat”. <https://opendata.jabarprov.go.id/> Diakses 15 Desember 2021
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. (2021). “Jumlah Anggaran Belanja Langsung Jawa Barat”. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-anggaran-belanja-langsung-di-jawa-barat> Diakses 2 Januari 2022
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2021) “Jumlah Penduduk (Jiwa), Tahun 2006-2020”. <https://jabar.bps.go.id/> Diakses 15 Desember 2021
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2022) “Jawa Barat Dalam Angka 2006”. <https://jabar.bps.go.id/> Diakses 01 Mei 2022
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2022) “Jawa Barat Dalam Angka 2007”. <https://jabar.bps.go.id/> Diakses 01 Mei 2022
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2022) “Jawa Barat Dalam Angka 2008”. <https://jabar.bps.go.id/> Diakses 01 Mei 2022
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2022) “Jawa Barat Dalam Angka 2009”. <https://jabar.bps.go.id/> Diakses 01 Mei 2022
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2022) “Jawa Barat Dalam Angka 2010”. <https://jabar.bps.go.id/> Diakses 01 Mei 2022
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat. (2020) “Laporan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Provinsi Jawa Barat”. <https://dpmpstp.jabarprov.go.id/> Diakses 15 Desember 2021

- Feriyanto, Nur. (2011), "Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Ekspor, Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia". Disertasi Thesis. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Feriyanto, Nur. (2016), "The Effect of employment, economic growth, and investment on HDI: In provinces in Indonesia". *Journal of Economics and Accountancy Ventura*, Vol. 19, No. 1, Hal. 1-12
- Gitaningtyas dan Taufik (2014), "Pengaruh produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, dan investasi swasta terhadap realisasi pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur" Universitas Negeri Jember. Jember.
- Hendriyani, N. (2017), " Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)" Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Hertanto, I., dan Jaka Sriyana. 2011. Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Vo. 12, no.1. hal 76-89.
- Hikmahyanti, N. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) per Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 5(4), 665-677.
- Jhingan (1996), *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Press. Yogyakarta
- Julfiansyah, Doni. (2013), "Pengaruh investasi PMA/PMDN dan jumlah penduduk terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah Samarinda". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 11 No. 2 Hal. 226-246
- Komarilina, D. H. L, Kadarisman, E., & Rohman, A. A. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan PDRB terhadap PAD Provinsi Jawa Barat (1). *JURNAL ILMU EKONOMI*, 6(2).

- Kurniawan, Theresia, dan Rahcmad (2017), “Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah serta tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi”. *E-Journal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman*, Vol. 13 No. 2 Hal. 68-77.
- Lubis, Rini Hayati dan Fitriani (2018), “Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1987-2016”. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman LAIN Padangsidempuan*, Vol. 6 No. 2 Hal. 114-131
- Mankiw, Gregory N. (2007). *Makro Ekonomi*, edisi keenam. Erlangga. Jakarta
- Nasional Single Window for Investment (NSWI). (2022). “Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Tahun 2006 s/d 2020”. https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik Diakses pada 29 April 2022
- Pamungkas, I. R. B. (2013). Analisis Pengaruh PMDN, PMA, dan PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pati Tahun 1982-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4).
- Pamungkas, Wildan Sesar (2019), “Pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah” Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Perwira, G. B. dan Widanta, B. P. (2014), “ Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah” *E-Jurnal Universitas Udayana*. Vol.3 No. 5 Hal. 173-226
- Prasetya, Ferry (2012). *Modul Ekonomi Publik Bagian V : Teori Pengeluaran Pemerintah*. Universitas Brawijaya. Malang
- Rosmalia, J., Iskandar, R., & Fitriadi. (2014). Pengaruh Investaso dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRN) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Vol.5 No 2 Hal. 159-172.

- Sanggabuana, H. (2008). Analisis Pengaruh Investasi Swasta terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Timur 1996 sampai dengan 2006. Skripsi. Universitas Airlangga. Surabaya
- Santosa, P. B., & Rahayu, R. P. (2005). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-faktor yang memengaruhinya dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kediri. *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP)*, 2(Nomor 1), 9-18.
- Sugiarto, D. S. (2006). Metode Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Sukirno, Sadono (2003). Pengantar Makro Ekonomi. Jakarta: Jakarta Press.
- Todaro, M. P. (1997). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jilid 1. Erlangga. Jakarta.
- Todaro, M. P. Dan Stephen C. Smith. (2008), Pembangunan Ekonomi. Erlangga. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Widada, Sri (2012), “Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klaten” Skripsi Sarjana, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

Widarjono, Agus. (2009). Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Edisi Ketiga. Ekonesia. Yogyakarta.



Lampiran 1

Data PMA,PMDN, Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah dan PAD

di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 -2020

Tahun	PAD (Ribu Rupiah)	PMA (Juta US\$)	PMDN (Miliar Rupiah)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pengeluaran Pemerintah (Ribu Rupiah)
2006	3.399.855,30	1.619,30	5.314,40	40.737.594	4.907.738
2007	4.221.668,70	1.326,90	11.347,90	41.483.729	5.341.776
2008	5.275.051,50	2.552,20	4.289,50	42.194.869	6.110.960
2009	5.520.994,70	1.934,40	4.724,90	42.994.567	8.193.614
2010	7.252.242,90	1.692,00	15.799,80	43.227.107	9.020.608
2011	8.502.566,80	3.839,40	11.194,30	43.938.796	10.295.570
2012	8.176.352,70	4.210,70	11.384,00	44.643.586	16.922.477
2013	8.485.710,30	7.214,90	9.006,10	45.340.799	18.396.745
2014	13.037.556,40	6.562,00	18.726,90	46.029.668	20.797.988
2015	15.837.707	5.738,70	26.272,90	46.709.569	28.366.703
2016	17.042.895,10	5.470,90	30.360,20	47.379.389	31.344.462
2017	17.102.520	5.142,90	38.390,60	48.037.827	24.054.880
2018	19.642.915,70	5.573,50	42.278,20	48.683.861	36.482.715
2019	21.244.266,02	5.881,00	49.284,20	49.316.712	39.199.187
2020	25.223.220,60	4.793,70	51.400,50	49.935.858	46.095.261

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Lampiran 2
Hasil estimasi linear

Dependent Variable: PAD
 Method: Least Squares
 Date: 12/16/21 Time: 20:16
 Sample (adjusted): 1 15
 Included observations: 15 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-36151347	20384013	-1.773515	0.1065
PMA	-160.5811	310.7810	-0.516702	0.6166
PMDN	120.0991	64.19566	1.870829	0.0909
JPEND	0.934576	0.506581	1.844872	0.0948
PENG.PEM	0.185619	0.078334	2.369586	0.0393
R-squared	0.987191	Mean dependent var		11997702
Adjusted R-squared	0.982067	S.D. dependent var		6914820.
S.E. of regression	925986.3	Akaike info criterion		30.57631
Sum squared resid	8.57E+12	Schwarz criterion		30.81232
Log likelihood	-224.3223	Hannan-Quinn criter.		30.57379
F-statistic	192.6734	Durbin-Watson stat		2.135302
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 3

Perkembangan Realisasi PMA Berdasarkan Sektor Primer

Tahun 2006 – 2020 Provinsi Jawa Barat (US\$ Ribu)

PMA	Sektor Primer				
	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	Kehutanan	Perikanan	Pertambangan	Total(Sektor)
2006	7,893.7	00.00	00.00	240.00.00	8,133.7
2007	12,980.4	00.00	1,091.4	2,804.4	16,876.2
2008	3,748.3	00.00	00.00	400.00.00	4,148.3
2009	1,741.5	00.00	00.00	500.00.00	2,241.5
2010	13,185.6	600.00.00	00.00	5,271.1	19,056.7
2011	11,869.0	00.00	00.00	31,554.2	43,423.2
2012	22,197.4	00.00	16,171.5	4,538.6	42,907.5
2013	3,627.4	00.00	254.05.00	15,693.2	19,575.1
2014	23,183.0	500.00.00	6,457.5	60,273.5	90,414.0
2015	49,987.0	00.00	467.00.00	15,894.7	66,348.7
2016	14,432.3	3,429.3	00.00	42,119.8	59,981.4
2017	44,707.4	114.00.00	5,556.9	4,594.3	54,972.6
2018	39,028.2	120.07.00	1,220.7	1,577.9	41,947.5
2019	33,255.4	454.01.00	916.06.00	2,890.6	37,516.7
2020	20,857.6	17.05	164.02.00	779.08.00	21,819.1

Lampiran 4
 Perkembangan Realisasi PMA Berdasarkan Sektor Sekunder
 Tahun 2006 – 2020 Provinsi Jawa Barat (US\$ Ribu)

Sektor Sekunder													
PMA	Industri Makanan	Industri Tekstil	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	Industri Kayu	Industri Kertas dan Percetakan	Industri Kimia Dan Farmasi	Industri Karet dan Plastik	Industri Mineral Non Logam	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	Industri Lainnya	<i>Total(Sektor)</i>

2006	21,726.3	58,410. 9	7,756.9	2,722. 1	77,017.0	104,030.7	93,310.4	15,494.0	103,566.5	490,800.5	326,901.4	103,209.2	1,404,945.9
2007	187,353.7	99,253. 1	7,733.3	6,650. 0	44,949.0	36,759.9	31,182.6	6,532.1	141,711.6	258,587.8	292,495.5	11,236.2	1,124,444.8
2008	106,198.4	149,850 .9	25,012. 3	00.00	164,323.2	2,183,847 .5	193,935.8	226,179.5	285,486.4	464,509.6	520,523.9	1,097.6	4,320,965.1
2009	75,771.4	180,430 .9	66,553. 0	5,225. 0	25,608.9	127,632.8	129,368.3	15,715.0	88,625.7	244,264.9	445,546.0	91,897.7	1,496,639.6
2010	138,229.5	134,884 .9	46,944. 4	00.00	28,439.9	66,466.8	64,519.8	27,827.2	66,905.6	237,216.7	330,492.0	11,908.0	1,153,834.8
2011	202,727.7	324,242 .3	48,071. 5	275.00 .00	15,961.9	362,829.9	257,986.1	45,180.6	89,318.7	812,489.4	680,061.8	17,176.7	2,856,321.6
2012	432,456.6	230,383 .0	39,884. 4	199.01 .00	128,818.5	351,435.0	476,223.2	35,276.2	114,803.9	554,629.7	1,456,672. 7	22,027.4	3,842,809.7
2013	509,041.1	430,410 .0	49,100. 9	1,200. 0	55,975.0	475,070.6	363,625.7	373,010.4	408,302.3	585,470.9	3,474,151. 8	23,754.8	6,749,113.5

2014	525,328.3	255,933 .5	24,981. 7	890.05 .00	41,409.9	269,909.4	452,267.4	367,052.1	237,672.0	889,598.6	1,837,606. 4	84,445.2	4,987,095.0
2015	213,438.7	171,295 .2	105,721 .7	950.00 .00	37,712.3	329,579.8	459,843.8	270,025.0	473,395.2	426,546.8	1,599,215. 4	28,643.2	4,116,367.1
2016	584,822.0	126,586 .2	29,651. 4	2,673. 9	60,823.5	227,311.2	387,500.5	144,338.0	195,890.5	393,573.2	2,183,667. 0	15,926.0	4,352,763.4
2017	183,357.7	159,797 .5	51,122. 5	1,245. 0	136,487.5	330,307.1	299,511.0	232,391.8	258,504.1	530,782.8	1,145,895. 8	49,703.1	3,379,105.9
2018	202,884.7	140,398 .2	69,929. 9	8,904. 2	209,267.4	318,110.4	194,308.6	225,433.7	72,335.1	960,870.0	862,827.6	69,735.6	3,335,005.4
2019	170,685.5	139,153 .0	49,717. 3	10,693 .4	103,039.5	350,206.5	158,732.3	102,243.3	39,095.7	49,818.9	643,523.3	177,066.4	1,993,975.1
2020	229,389.2	77,942. 8	52,871. 5	10,364 .7	38,263.8	152,202.2	52,996.5	24,691.5	9,214.3	177,380.4	784,883.6	219,084.4	1,829,284.9

Lampiran 5

Perkembangan Realisasi PMA Berdasarkan Sektor Tersier

Tahun 2006 – 2020 Provinsi Jawa Barat (US\$ Ribu)

PMA	Sektor Tersier	
	Listrik, Gas dan Air	Konstruksi
2006	6,100.0	3,998.0
2007	00.00	17,816.7
2008	00.00	58,755.4
2009	91,984.8	154,184.3
2010	297,264.4	33,930.2
2011	538,961.0	177,049.4
2012	183,454.7	368.02.00
2013	24,352.5	59,417.9
2014	48,203.1	986,621.1
2015	12,535.2	301,279.1
2016	72,801.1	11,416.7
2017	307,164.6	80,516.6
2018	351,733.7	6,779.2
2019	1,172,286.4	36,049.4
2020	716,395.7	100,270.5

Lampiran 6

Perkembangan Realisasi PMDN Berdasarkan Sektor Primer
Tahun 2006 – 2020 Provinsi Jawa Barat (US\$ Ribu)

PMDN	Sektor Primer				
	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	Kehutanan	Perikanan	Pertambangan	Total(Sektor)
2006	6,763.3	00.00	00.00	00.00	6,763.3
2007	7,851.5	00.00	00.00	00.00	7,851.5
2008	00.00	00.00	00.00	290,312.0	290,312.0
2009	147,623.6	00.00	00.00	62,994.2	210,617.8
2010	239,347.3	00.00	00.00	00.00	239,347.3
2011	4,939.8	00.00	00.00	00.00	4,939.8
2012	25,826.0	00.00	00.00	00.00	25,826.0
2013	20,762.4	00.00	00.00	00.00	20,762.4
2014	49,488.7	00.00	00.00	33,059.8	82,548.5
2015	11,604.2	00.00	00.00	6,968.3	18,572.5
2016	170,705.4	374.00.00	00.00	6,270.0	177,349.4
2017	72,072.0	00.00	3,562.1	1,019.8	76,653.9

2018	148,503.0	00.00	5,191.7	146,913.6	300,608.3
2019	845,733.1	00.00	35.00.00	95,057.5	940,825.6
2020	53,020.6	4,000.0	9,516.8	128,900.4	195,437.8

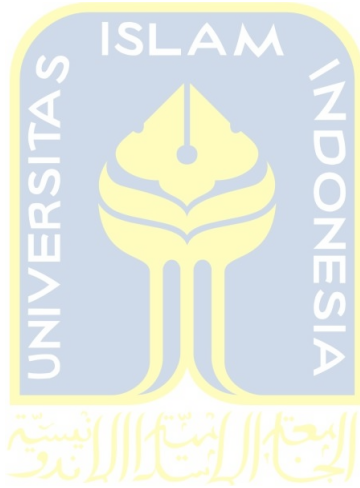


Lampiran 7
 Perkembangan Realisasi PMDN Berdasarkan Sektor Sekunder
 Tahun 2006 – 2020 Provinsi Jawa Barat (US\$ Ribu)

PMD N	Sektor Sekunder												
	Industri Makanan	Industri Tekstil	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	Industri Kayu	Industri Kertas dan Percetakan	Industri Kimia Dan Farmasi	Industri Karet dan Plastik	Industri Mineral Non Logam	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	Industri Lainnya	Total(Sektor)
2006	166,912.7	42,099.3	00.00	00.00	1,682,010.8	2,967,282.4	34,766.1	72,950.0	303,518.9	13,002.1	00.00	00.00	5,282,542.3
2007	550,669.7	108,393.2	00.00	00.00	10,001,056.9	31,030.0	158,617.7	00.00	278,500.6	26,562.7	281,687.4	00.00	11,436,518.2

2008	835,827.0	594,004.4	10,094.2	14,000.0	10,537.9	230,931.7	347,930.2	191,133.2	468,083.0	255,603.1	28.00.00	9,956.1	2,968,128.8
2009	684,378.1	1,068,188.2	00.00	00.00	375,753.7	651,421.6	763,088.1	310,217.0	135,313.1	241,007.6	00.00	60,540.0	4,289,907.4
2010	3,703,642.0	268,868.8	00.00	00.00	373,750.7	616,520.8	180,928.8	131,888.0	18,936.8	127,232.2	133,823.6	00.00	5,555,591.7
2011	1,385,773.5	472,485.9	13,244.3	00.00	1,775,873.7	206,954.2	1,564,004.9	472,560.4	876,328.4	919,757.6	651.06.00	765.01.00	7,688,399.6
2012	440,009.1	430,154.6	4,409.7	00.00	350,156.2	307,503.8	714,718.0	5,623,594.0	906,346.1	7,765.2	00.00	555.09.00	8,785,212.6
2013	1,109,297.0	1,120,532.4	2,500.0	00.00	1,563,872.8	1,006,623.4	818,021.8	176,532.2	717,438.8	314,022.8	482,226.2	82,450.2	7,393,517.6
2014	1,211,702.6	170,471.9	67,259.4	619.06.00	859,756.1	215,146.2	1,356,118.2	200,695.6	279,375.4	256,144.5	386,356.9	24,538.5	5,028,184.9
2015	3,647,086.8	679,862.1	1,450.0	8,158.0	953,547.1	5,225,832.9	1,234,281.0	4,538,572.3	1,609,443.3	173,217.6	604,726.9	78,839.3	18,755,017.3
2016	3,673,035.4	1,193,772.2	00.00	1,762.0	2,051,583.4	2,681,671.2	1,033,967.6	1,051,479.6	4,125,703.3	208,766.5	731,997.4	336,659.4	17,090,398.0
2017	6,755,104.9	3,613,071.2	34,721.1	131,100.0	5,512,928.8	2,767,896.6	2,301,551.5	935,696.0	1,888,744.6	667,194.9	395,556.4	79,328.1	25,082,894.1

2018	4,573,682.7	866,559.5	47,490.6	27,738.3	252,848.6	3,820,372.4	489,747.8	613,477.2	1,926,344.9	576,746.3	237,441.0	164,145.5	13,596,594.8
2019	2,287,340.7	382,791.0	4,916.6	3,717.3	81,394.2	1,421,953.1	643,562.3	795,582.0	3,609,957.3	55,368.1	69,002.7	268,636.8	9,624,222.1
2020	1,536,804.0	1,234,934.5	50,075.0	6,064.6	475,716.3	2,473,982.8	1,603,945.6	713,026.9	1,146,343.8	339,975.3	423,885.4	124,370.3	10,129,124.5



Lampiran 8

**Perkembangan Realisasi PMDN Berdasarkan Sektor Tersier
Tahun 2006 – 2020 Provinsi Jawa Barat (US\$ Ribu)**

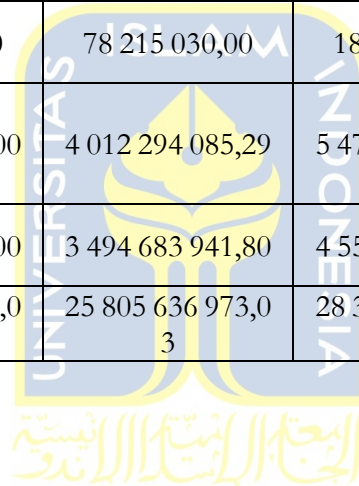
PMDN	Sektor Tersier	
	Listrik, Gas dan Air	Konstruksi
2006	2,875,545.1	415.00.00
2007	8,074.1	00.00
2008	294,450.0	744,439.8
2009	1,015,163.2	00.00
2010	1,739,152.0	00.00
2011	1,714,316.8	553,579.2
2012	156,502.7	00.00
2013	11.09	00.00
2014	9,139,200.4	2,463,020.9
2015	2,546,564.7	4,091,611.0
2016	1,985,332.8	6,246,256.9
2017	2,484,491.0	894,070.0
2018	5,139,291.3	10,191,006.0
2019	3,670,647.9	16,655,322.1
2020	2,254,989.0	25,232,919.7

Lampiran 9

Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Ribuan Rupiah)

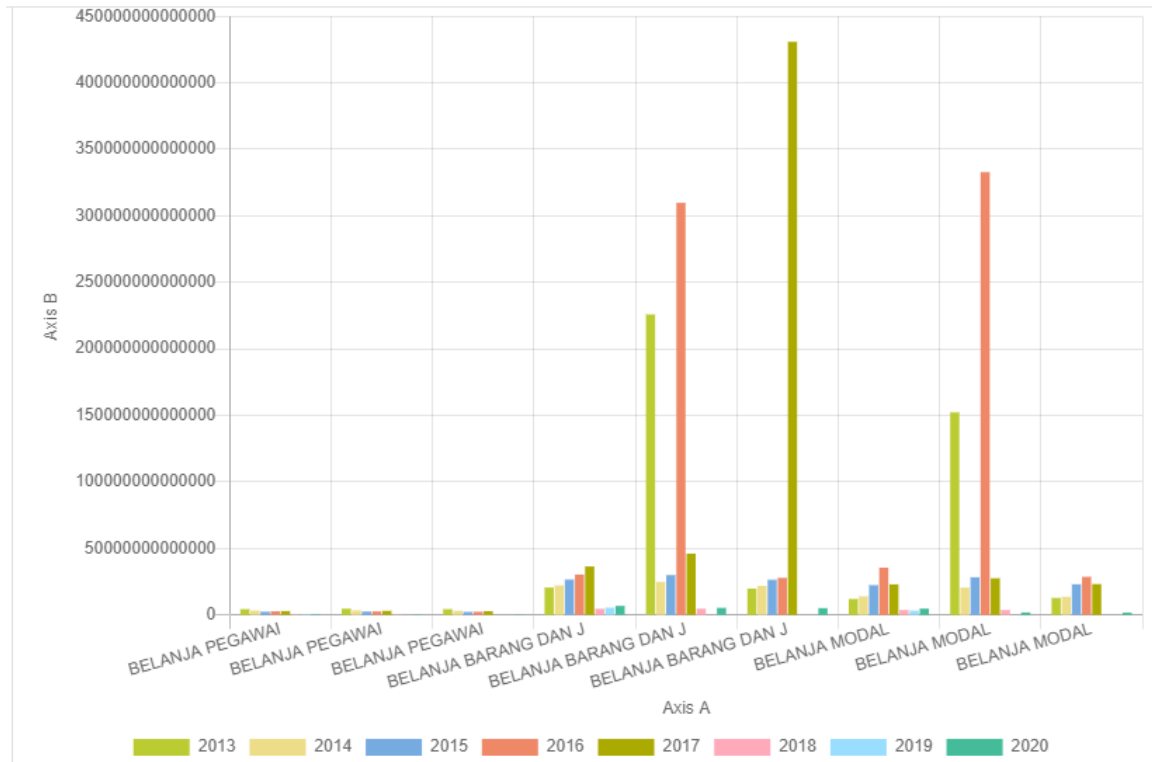
Jenis Penerimaan	Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Ribuan Rupiah)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pendapatan Daerah	11053859587.76	16878128995.00	19 237 611 310,00	22 310 953 031,23	23 814 831 622,95	27 694 035 120,86	24 054 880 848,03	33 919 022 032,34
Pendapatan Asli Daerah	8502643155.49	9982917415.00	12 360 109 870,00	15 038 153 309,92	15 837 707 187,07	17 042 895 113,67	17 102 520 315,84	19 642 915 448,76
Pajak Daerah	7696484754.04	9149214330.00	11 236 145 855,00	13 753 760 402,65	14 617 071 393,16	15 727 483 589,79	16 483 095 520,64	18 153 616 036,19
Retribusi Daerah	50737863.17	57326324.00	63 654 936,00	70 081 405,58	73 404 322,72	73 564 738,40	51 024 786,51	49 176 487,70
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	229147336.15	232647377.00	261 601 089,00	304 380 444,82	281 661 628,12	322 402 263,91	0	348 537 989,63
Lain-lain PAD yang Sah	526273202.13	543729384.00	798 707 990,00	909 931 056,87	865 569 843,07	919 444 521,58	568 400 008,68	1 091 584 935,24

Dana Perimbangan	2526078026.56	2832746609.00	2 950 532 546,00	3 260 505 636,02	2 506 877 511,84	10 622 671 443,68	6 940 686 332,19	14 208 000 403,58
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1298760318.56	1514429569.00	1 398 007 485,00	1 494 604 220,02	1 184 319 132,84	1 778 216 936,25	0	1 804 540 601,86
Dana Alokasi Umum	1181553108.00	1269960760.00	1 472 453 011,00	1 687 686 386,00	1 303 654 355,00	1 248 112 171,86	0	3 023 552 986,00
Dana Alokasi Khusus	45764600.00	48356280.00	80 072 050,00	78 215 030,00	18 904 024,00	7 596 342 335,57	0	9 379 906 815,72
Lain-lain Pendapatan yang Sah	25138405.72	4062464971.00	3 926 968 894,00	4 012 294 085,29	5 470 246 924,04	28 468 563,50	11 674 200,00	68 106 180,00
Pembiayaan Daerah	2449742871.99	3003186559.00	2 934 630 844,00	3 494 683 941,80	4 551 871 624,71	3 650 427 200,63	-	2 563 692 823,11
Jumlah	13503602459.76	19881315554.00	22 172 242 154,00	25 805 636 973,03	28 366 703 247,66	31 344 462 321,49	24 054 880 848,03	36 482 714 855,45



Lampiran 10

Grafik Jumlah Anggaran Belanja Langsung di Jawa Barat tahun 2013-2020



Sumber: Open Data Jawa Bara

